

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, sumber keuangan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Di antara sumber tersebut, PAD merupakan sumber keuangan yang paling mendasar karena berasal dari potensi daerah itu sendiri dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang sah (Usman Regina, 2020). Peran PAD sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Hidayati et al, 2022).

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), indikator penting lain dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi (Endang et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional. Di era

globalisasi, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesejahteraan masyarakat pun tidak terlepas dari kemampuan negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi tuntutan untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan matang, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek, seperti tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta kinerja sektor-sektor ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah utama seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, setiap negara terus berupaya meningkatkan pertumbuhannya sebagai langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus sebagai sarana dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ivonia et al., 2024).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yang baik cenderung sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya manusia sebagai bagian dari faktor produksi merupakan aset paling berharga dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai apabila sumber daya yang dimiliki mampu bersaing di tingkat global. Daya saing tersebut dapat diwujudkan melalui kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pendekatan modern dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan manusia secara menyeluruh.

Menurut perspektif UNDP dalam penelitian Raharti et al., (2020), pembangunan manusia diartikan sebagai proses perluasan pilihan bagi masyarakat. Upaya ini dapat tercapai apabila berbagai dimensi pembangunan manusia terus ditingkatkan, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, guna mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan, karena merupakan faktor penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memiliki kemampuan lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga menuntut peningkatan kemampuan manusia dalam menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan demikian, akan terbentuk kualitas dan pola kerja yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta hambatan pembangunan di era globalisasi saat ini. Dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia di suatu daerah atau negara, perlu diperhatikan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta langkah-langkah untuk meningkatkannya, seperti memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan kesempatan kerja yang layak, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sigalingging & Rijal, 2023).

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja setelah pekerjaan yang telah disepakati dalam hubungan kerja selesai dilaksanakan, dan bersifat wajib untuk dipenuhi. Apabila pekerja telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja, maka pengusaha berkewajiban untuk membayarkan upah tersebut dalam bentuk uang sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Pembayaran tersebut ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

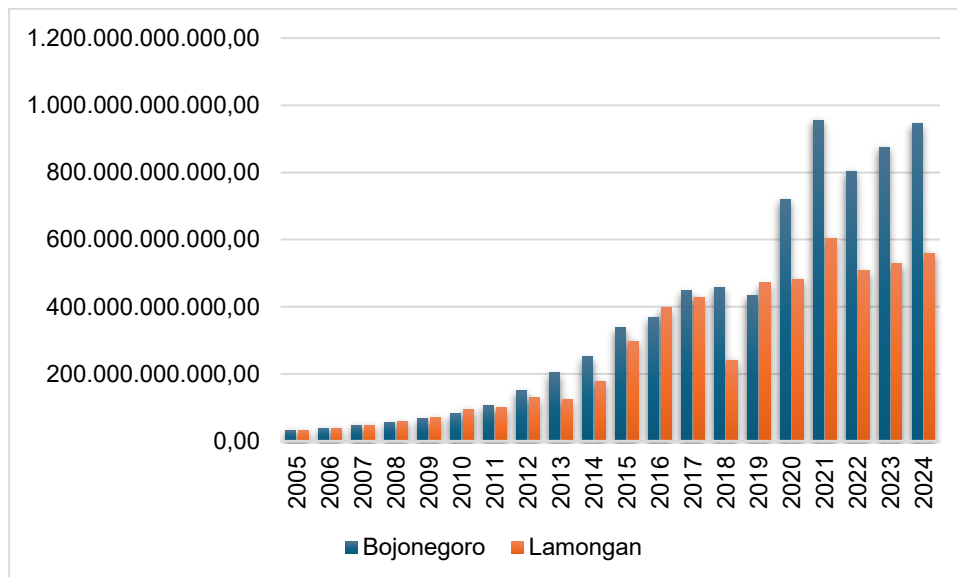
Selain itu, upah juga mencakup berbagai bentuk tunjangan yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya. Imbalan ini diberikan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh pekerja dalam hubungan kerja. Artinya, upah tidak hanya sekadar kompensasi finansial, tetapi juga mencerminkan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha (Abduh, 2022). Salah satu indikator kesejahteraan tenaga kerja yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi daerah adalah kebijakan upah minimum. Kebijakan ini merupakan sistem pengupahan yang telah diterapkan di berbagai negara dan pada dasarnya dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama, upah minimum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja agar tingkat upah yang diterima tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, kebijakan ini juga menjadi sarana perlindungan bagi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Dwirainaningsih, 2017).

Fenomena empiris yang menjadi perhatian dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kondisi ekonomi antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, tetapi juga mencakup adanya ketidaksinkronan antara indikator ekonomi daerah dengan kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di kedua wilayah tersebut. Perbedaan struktur ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah tidak sekadar mencerminkan variasi sumber pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengarah pada kemungkinan adanya perbedaan dalam

efektivitas bagaimana kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam kebijakan upah minimum.

Sejumlah studi terdahulu menelaah hubungan antara komponen pendapatan daerah dan kinerja ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Dalam salah satu penelitian, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diuji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan dari kedua sumber tersebut berkorelasi dengan membaiknya kondisi keuangan daerah. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi aspek krusial dalam memperkuat kapasitas fiskal, sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah (Fatmawati, 2020). Di sisi lain, penelitian berbeda mengungkapkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan PAD dapat mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa kenaikan upah berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas aktivitas ekonomi. Secara simultan, PAD dan UMK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor fiskal dan kebijakan pengupahan memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika ekonomi daerah (Avinda Tyas Savitri, Faisol, 2020).

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan
Tahun 2005-2024 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BPKAD Bojonegoro dan Lamongan

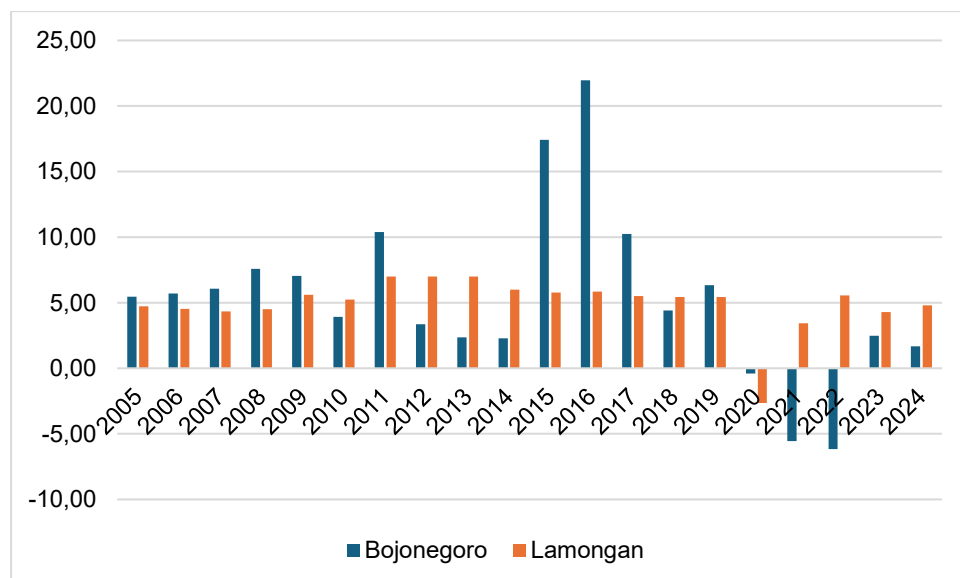
Grafik tersebut menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif bagi kedua kabupaten selama hampir dua dekade, dengan Kabupaten Bojonegoro (batang biru) secara konsisten mengungguli Kabupaten Lamongan (batang oranye) dalam perolehan PAD, terutama sejak memasuki tahun 2012. Pada periode awal (2005–2011), selisih pendapatan antara kedua wilayah masih tergolong tipis dan stabil di level yang rendah. Namun, mulai tahun 2012, Bojonegoro menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan, di mana jarak pendapatannya dengan Lamongan semakin melebar setiap tahunnya.

Puncak pertumbuhan paling mencolok terlihat pada rentang tahun 2020 hingga 2021, di mana PAD Bojonegoro melonjak drastis hingga mendekati angka Rp1 triliun, sementara Lamongan berada di kisaran Rp600 miliar. Meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi atau penurunan pada tahun 2022, Bojonegoro kembali menunjukkan tren kenaikan hingga tahun 2024. Sebaliknya, meskipun PAD Lamongan juga mengalami peningkatan secara bertahap, pertumbuhannya

cenderung lebih landai dan stabil dibandingkan dinamika pertumbuhan pesat yang dialami oleh Bojonegoro. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan dominasi fiskal Bojonegoro terhadap Lamongan dalam hal kemandirian pendapatan daerah selama periode tersebut.

Secara komparatif, Bojonegoro menunjukkan kemampuan peningkatan PAD yang lebih tinggi, terutama setelah tahun 2019, dengan lonjakan yang jauh melampaui Lamongan. Namun, Lamongan memperlihatkan pola pertumbuhan yang lebih stabil meskipun tidak setinggi Bojonegoro. Perbedaan ini mengindikasikan adanya variasi dalam struktur ekonomi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Bojonegoro cenderung memiliki potensi pendapatan yang besar namun lebih berfluktuasi, sedangkan Lamongan menunjukkan pertumbuhan yang lebih terkendali dengan kecenderungan stabil dalam jangka panjang.

Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan Tahun 2005-2024 (Dalam Persen)

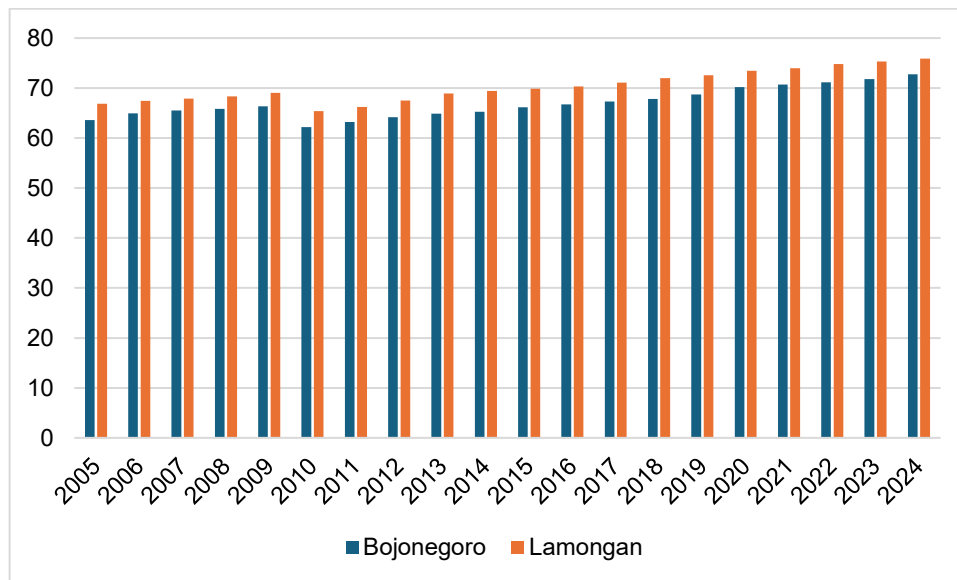


Sumber: Badan Pusat Statistik 2026

Grafik tersebut memperlihatkan perbedaan karakteristik ekonomi yang sangat kontras antara kedua wilayah, di mana Kabupaten Bojonegoro (batang biru) memiliki volatilitas yang tinggi sementara Kabupaten Lamongan (batang oranye) cenderung lebih stabil. Ekonomi Bojonegoro sempat mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat luar biasa pada periode 2015–2016, dengan puncak mencapai lebih dari 20% pada tahun 2016, yang jauh melampaui pertumbuhan Lamongan yang rata-rata bertahan di angka 5% hingga 7%. Namun, ekonomi Bojonegoro juga mengalami kerentanan yang tajam, terlihat dari kontraksi ekonomi (pertumbuhan negatif) yang cukup dalam pada tahun 2020 hingga 2022, di mana angka pertumbuhannya merosot hingga di bawah -5% sebelum akhirnya mulai pulih kembali pada tahun 2023.

Di sisi lain, Kabupaten Lamongan menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih konsisten dengan fluktuasi yang tidak terlalu ekstrem. Meskipun sempat terdampak pandemi pada tahun 2020 sehingga mengalami pertumbuhan negatif, pemulihan ekonomi di Lamongan terjadi lebih cepat dan stabil dibandingkan Bojonegoro. Hingga tahun 2024, Lamongan berhasil mempertahankan laju pertumbuhan yang lebih tinggi (mendekati 5%) dibandingkan Bojonegoro yang masih berada di level pertumbuhan yang rendah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun Bojonegoro memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi pada periode tertentu, ekonomi Lamongan jauh lebih resilien dan stabil dalam menghadapi perubahan siklus ekonomi.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan Tahun 2005-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2026

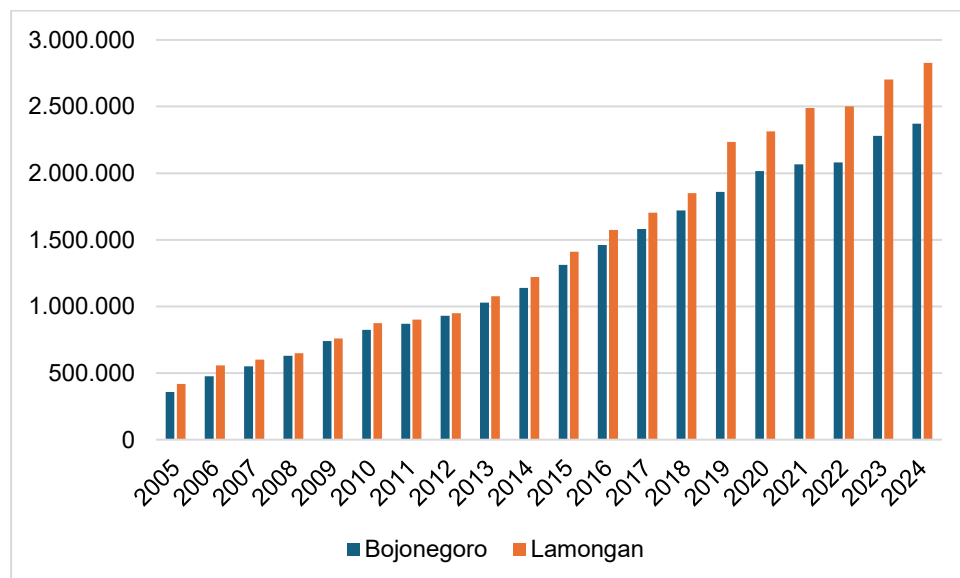
Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama hampir dua dekade, Kabupaten Lamongan (batang oranye) secara konsisten memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bojonegoro (batang biru). Meskipun kedua wilayah menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya, terdapat kesenjangan yang cukup konstan di mana kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup di Lamongan selalu selangkah di depan Bojonegoro. Pada tahun 2010, terlihat adanya penyesuaian nilai (kemungkinan karena perubahan metodologi penghitungan oleh BPS), namun setelah itu kedua kabupaten kembali merangkak naik secara linear.

Hingga akhir periode pengamatan pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan berhasil mencapai angka IPM di kisaran 75, yang menunjukkan kategori pembangunan manusia yang sangat baik. Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro terus membuntuti dengan peningkatan yang positif hingga mencapai angka di atas 70. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran bahwa walaupun

Bojonegoro memiliki keunggulan dari sisi PAD (seperti grafik sebelumnya), dalam hal capaian kualitas pembangunan manusia secara umum, Kabupaten Lamongan masih memegang keunggulan dibandingkan tetangganya tersebut.

Secara perbandingan, kedua wilayah sama-sama mengalami perkembangan yang positif, namun Lamongan tetap berada pada posisi yang lebih tinggi dalam hal capaian IPM. Meski demikian, selisih antara keduanya tidak terlalu besar dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, yang menandakan bahwa Bojonegoro juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan meskipun masih berada sedikit di bawah Lamongan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa arah pembangunan manusia di kedua daerah berjalan selaras, tetapi dengan tingkat pencapaian yang berbeda. Lebih jauh, tren ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak semata ditentukan oleh kapasitas ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya di masing-masing daerah.

Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan Tahun 2005-2024 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber: Databoks-DaftarUMR

Grafik tersebut menunjukkan tren kenaikan nilai UMK yang progresif di kedua wilayah selama hampir dua dekade, dengan Kabupaten Lamongan (batang oranye) yang secara konsisten memiliki standar upah lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bojonegoro (batang biru). Pada periode awal (2005–2013), selisih nilai upah antara kedua kabupaten ini tergolong sangat tipis. Namun, mulai tahun 2014, kesenjangan tersebut mulai melebar seiring dengan kenaikan yang lebih signifikan di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. Kesenjangan ini terlihat semakin mencolok dalam lima tahun terakhir (2019–2024), di mana nilai UMK Lamongan tumbuh lebih cepat dan melampaui angka Rp2,8 juta pada tahun 2024, sementara Bojonegoro berada di kisaran Rp2,4 juta. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meski kedua daerah mengalami pertumbuhan kesejahteraan pekerja, Kabupaten Lamongan secara kumulatif mempertahankan daya saing standar upah yang lebih tinggi bagi para tenaga kerjanya dibandingkan Bojonegoro.

Secara komparatif, grafik UMK di Lamongan yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang berwarna oranye menunjukkan pola pertumbuhan yang cenderung lebih agresif. Meskipun titik awalnya relatif sejajar dengan Bojonegoro, Lamongan mengalami percepatan kenaikan UMK yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi menarik karena secara kapasitas fiskal, Lamongan tidak sebesar Bojonegoro, sehingga mengindikasikan adanya faktor lain di luar PAD dan pertumbuhan ekonomi yang turut memengaruhi proses penetapan UMK di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara indikator ekonomi daerah seperti PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM dengan kebijakan penetapan UMK di masing-masing wilayah. Secara teoritis,

peningkatan kapasitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia seharusnya mendorong peningkatan upah minimum. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara linear dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK dalam konteks karakteristik ekonomi daerah yang berbeda.

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini menjadi sangat penting karena memberikan ruang untuk memahami perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah secara lebih mendalam. Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan memiliki struktur ekonomi, sumber pendapatan, serta dinamika pembangunan yang berbeda, sehingga respons terhadap variabel PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap UMK juga berpotensi berbeda. Analisis komparatif tidak hanya berfungsi untuk melihat perbedaan hasil, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menjadi pendorong utama dalam masing-masing wilayah. Dengan demikian, pendekatan ini mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual dibandingkan dengan penelitian yang hanya berfokus pada satu daerah.

Aspek komparatif dalam penelitian ini juga memungkinkan identifikasi pola kebijakan yang bersifat kontekstual, bukan universal. Artinya, kebijakan yang efektif di Kabupaten Lamongan belum tentu memberikan hasil yang sama di Kabupaten Bojonegoro. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, struktur pasar tenaga kerja, serta tingkat investasi daerah. Dengan membandingkan kedua wilayah, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana kebijakan berbasis PAD dan pertumbuhan ekonomi mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan melalui UMK.

Perbedaan dinamika pasar tenaga kerja antara kedua daerah juga menjadi faktor penting dalam analisis. Kabupaten dengan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi cenderung memiliki tekanan pasar yang berbeda dalam penentuan upah dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada sektor primer. Hal ini berdampak pada elastisitas upah terhadap variabel ekonomi seperti pertumbuhan dan IPM. Oleh karena itu, pendekatan komparatif memberikan keunggulan dalam menangkap variasi respons kebijakan terhadap kondisi pasar tenaga kerja yang berbeda.

Perbedaan basis ekonomi antara kedua wilayah tersebut memungkinkan terjadinya variasi dalam efektivitas kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan. Kabupaten Bojonegoro yang bertumpu pada sektor ekstraktif seperti minyak dan gas cenderung memiliki fluktuasi pendapatan yang tinggi, yang dapat memengaruhi stabilitas PAD serta kebijakan pengupahan. Sementara itu, Kabupaten Lamongan dengan basis ekonomi yang lebih beragam seperti perdagangan dan industri pengolahan memiliki potensi kestabilan ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini menjadi landasan penting dalam analisis komparatif untuk melihat bagaimana struktur ekonomi memengaruhi hubungan antara variabel penelitian.

Dari sisi teori ekonomi regional, hubungan antara PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap UMK tidak selalu bersifat linear dan seragam di setiap daerah. Dalam konteks daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, peningkatan PAD dapat secara langsung mendorong kenaikan UMK melalui peningkatan belanja publik dan kesejahteraan Masyarakat (Iqbal et al., 2020). Namun, pada daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, pengaruh tersebut bisa menjadi tidak signifikan atau bahkan berbeda arah. Oleh karena itu,

pendekatan komparatif dalam penelitian ini mampu menguji validitas teori dalam konteks empiris yang berbeda.

Integrasi variabel IPM dalam penelitian ini menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu lebih berfokus pada aspek ekonomi makro dan fiskal tanpa mempertimbangkan kualitas pembangunan manusia. IPM memiliki peran penting sebagai indikator kesejahteraan yang dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan daya tawar dalam penentuan upah (Agustin & Sumarsono, 2022). Dengan memasukkan IPM, penelitian ini tidak hanya melihat aspek kuantitatif ekonomi, tetapi juga dimensi kualitas pembangunan secara menyeluruh.

Celah penelitian (*research gap*) dalam studi ini terletak pada terbatasnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan simultan dan komparatif dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial, baik dari sisi pemilihan variabel maupun cakupan wilayah yang diteliti. Di samping itu, kajian yang secara khusus membandingkan daerah dengan basis ekonomi sumber daya alam dan daerah yang bertumpu pada sektor industri serta jasa terutama dalam konteks penetapan UMK masih relatif jarang ditemukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, sebagaimana yang diupayakan dalam studi ini.

Penelitian terdahulu umumnya hanya menguji hubungan langsung antar variabel, seperti pengaruh variabel fiskal terhadap kinerja keuangan atau hubungan PAD dan UMK terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa menggunakan kerangka analisis yang terpadu. Selain itu, sebagian besar penelitian masih terbatas pada satu wilayah dan belum melakukan perbandingan antar daerah, sehingga belum mampu menangkap perbedaan karakteristik ekonomi dan

kapasitas fiskal. Penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih terbatas, padahal berpotensi memengaruhi hubungan antara faktor ekonomi dan kebijakan upah minimum. Oleh karena itu, terdapat kekosongan penelitian berupa minimnya analisis komparatif yang mengintegrasikan PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM dalam menjelaskan penentuan UMK. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut melalui pendekatan simultan dan komparatif pada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks kebijakan desentralisasi fiskal yang menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Perbedaan kemampuan fiskal antar daerah sering kali menimbulkan kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal penetapan upah minimum. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi UMK menjadi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan proporsional.

Penelitian ini juga diperkuat oleh kebutuhan akan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), khususnya dalam konteks penetapan UMK yang sering kali menjadi isu sensitif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Tanpa analisis yang komprehensif, kebijakan upah berisiko tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris yang lebih objektif dalam proses perumusan kebijakan.

Perkembangan globalisasi serta meningkatnya persaingan di pasar tenaga kerja menuntut kebijakan pengupahan yang tidak semata bertumpu pada kondisi ekonomi lokal, tetapi juga mempertimbangkan aspek daya saing antar wilayah. Dalam konteks ini, hasil analisis komparatif antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan dapat memberikan gambaran strategis mengenai

perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik masing-masing daerah. Pendekatan ini menjadi penting agar kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu berperan sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi regional dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi PAD, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan UMK antara daerah, pemerintah dapat merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga pada pemerataan pembangunan ekonomi secara regional, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan?

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap UMK antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan (analisis komparatif)?
3. Faktor manakah yang paling dominan memengaruhi UMK di masing-masing daerah, serta bagaimana implikasinya terhadap perumusan kebijakan pengupahan yang lebih kontekstual dan berkeadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan secara simultan maupun parsial.
2. Untuk membandingkan perbedaan pengaruh PAD, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap UMK antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan melalui pendekatan komparatif.
3. Untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi UMK di masing-masing daerah serta merumuskan implikasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis data.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. penelitian ini juga berupaya melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji variabel secara parsial, sehingga memberikan perspektif baru

melalui pendekatan integratif dan komparatif antar daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan terkait penetapan UMK dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus pada analisis pengaruh faktor-faktor ekonomi daerah terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK). Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:
2. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup analisis ekonomi regional dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber terkait lainnya. Objek penelitian difokuskan pada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan dengan periode waktu 2005-2024, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada wilayah dan periode tersebut.
3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan selama periode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk runtut waktu (time series) yang

diperoleh dari publikasi instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan lembaga pemerintah lainnya.

4. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh data time series yang tersedia selama periode 2005–2024 dijadikan sebagai sampel penelitian. Penggunaan seluruh data dilakukan agar hasil analisis dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan variabel penelitian secara lebih akurat pada masing-masing kabupaten.
5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang mencerminkan kebijakan pengupahan di tingkat daerah. Sementara itu, variabel independen meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemampuan fiskal daerah, (2) pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan (3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia.
6. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis pengaruh langsung (direct effect) variabel independen terhadap variabel dependen tanpa memasukkan variabel lain di luar model penelitian, seperti inflasi, tingkat pengangguran, investasi, maupun faktor kebijakan pemerintah lainnya. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.